

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya (Sukirno, 2010).

Pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dimana pengaturan sumber daya diarahkan guna memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (Public Services) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas

pengelolaan sumber daya masyarakat (publik) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan (3) meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan (Sakti, 2007).

Pembangunan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan berlangsung secara berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya mencerminkan kemajuan suatu negara/daerah dalam proses pembangunan, walaupun banyak mendapat tanggapan dari para ekonom terutama mengenai distribusi pendapatan, namun tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan masih digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai peningkatan pendapatan perkapita yang merupakan suatu proses kenaikan output perkapita yang diukur dan dihitung dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi bukan menjadi jaminan bagi kesejahteraan masyarakat apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan mutlak untuk diperhatikan, karena pemerataan pembangunan bertujuan agar pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat dirasakan hasilnya oleh segenap lapisan masyarakat golongan ekonomi kuat dan lemah. Hal ini jelas akan memberi dampak positif terhadap persatuan dan kesatuan masyarakat dan mendorong peningkatan peran masyarakat serta partisipasi yang lebih besar dalam pembangunan (Baeti, 2013).

Gambaran yang lebih jelas mengenai pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2009 – 2023 dapat dilihat pada Tabel

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	6.39
2010	7.35
2011	7.86
2012	7.03
2013	6.84
2014	7.36
2015	4.21
2016	4.37
2017	4.60
2018	4.69
2019	4.35
2020	-0.51
2021	3.69
2022	5.13
2023	4.66
Rata-rata	5.20

Sumber : BPS provinsi jambi 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tidak konsisten dan berflutuaktif cenderung lambat. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -0,51 persen, Penyebabnya adalah virus covid-19 yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak stabil dan mengalami penurunan yang sangat tajam, yang disebabkan oleh adanya penurunan output ekonomi daerah sejalan dengan mobilitas ekonomi yang disebabkan oleh virus corona. Penurunan ini terjadi hamper di semua sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat pada tahun 2011 sebesar 7,86 persen.

Menurut laporan perekonomian BI kabupaten, pertumbuhan ekonomi Jambi meningkat di sektor perdagangan, hotel serta restoran (PHR) dan pertanian. Sementara, peningkatan konsumsi rumah tangga swasta dan pembentukan modal nasional bruto (PMTDB) mempercepat pertumbuhan ekonomi dari segi penggunaan, namun demikian sektor-sektor yang memberikan kontribusi cukup besar ialah sektor industri pengolahan serta perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berdasarkan harga konstan selama periode tahun 2012-2016 secara rata-rata 5,18 % per tahun. dengan kontribusi terbesar bersumber dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pertambangan penggalian (Sudirman, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten ataupun Kota di Provinsi Jambi membuktikan peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini ialah aset penting didalam prosedur percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan, dengan pertumbuhan IPM yang terus berlanjut diharapkan dapatlah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kawasan. Proporsi masyarakat miskin di setiap kelurahan ataupun kota masih berfluktuasi cukup signifikan, namun dari tahun 2010 hingga 2019 angkanya cenderung menurun.

Tabel 1.2
Kredit Perbankan Provinsi Jambi Tahun 2009 –2023

Tahun	KI (Rupiah)	KMK (Rupiah)	Total (Rupiah)	Perkembangan %
2009	32.898.507	49.159.392	82.057.899	-
2010	27.801.126	66.867.427	94.668.553	15.4%
2011	36.793.020	102.730.133	139.523.153	47.4%
2012	51.397.035	111.440.303	162.837.339	16.7%
2013	84.004.067	118.880.588	202.884.655	24.6%
2014	109.283.986	126.332.161	235.616.147	16.1%
2015	122.505.560	135.748.783	258.254.343	9.6%
2016	133.413.444	139.623.280	273.036.724	5.7%
2017	133.653.623	143.920.004	277.573.627	1.7%
2018	135.307.936	169.797.459	305.105.395	9.9%
2019	147.594.939			
2020	145.109.955	218.870.982	363.980.937	4.1%
2021	158.810.274	227.202.065	386.012.339	6.1%
2022	217.546.028	239.557.123	457.103.151	18.4%
2023	272.136.130	239.979.301	512.115.431	12.0%

Sumber : Bank indonesia provinsi jambi 2024

Kredit Provinsi jambi berdasarkan penggunaannya (dalam jutaan rupiah)

KI : Kredit Investasi

KMK : Kredit Modal Kerja

Berdasarkan Tabel 2 di atas terlihat Kredit investasi dan kredit modal kerja provinsi jambi cenderung meningkat dari tahun ketahun. Kredit Investasi yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk dipergunakan melakukan investasi dengan membeli barang barang modal. Kredit investasi

merupakan kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk membiayai pengadaan barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi dan pendirian proyek. Menurut (Firdaus dan Aryanti, 2010) bahwa kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang modal tetap dan tahap lama seperti tanah dan bangunan, mesin mesin, kendaraan dan sebagainya. Contohnya untuk membeli mesin, membeli tanah, membangun tempat usaha maupun kendaraan yang menunjang keberlangsungan usaha. Menurut pendapat (Kasmir, 2011) bahwa kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit ini ditujukan untuk nasabah yang kekurangan modal kerja untuk usahanya. Faktor faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal adalah tingkat penjualan dan perputaran modal kerja. Jika nasabah menginginkan kredit modal kerja berkesinambungan maka pihak bank menyediakan fasilitas kredit modal kerja revolving yaitu kredit yang dapat diperpanjang masa berlakunya setelah jatuh tempo. Ada juga fasilitas kredit modal kerja transaksional yaitu kredit modal kerja yang dikeluarkan oleh bank bagi nasabah yang tidak memerlukan kredit modal kerja secara terus menerus tetapi hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan usahanya. (Riva'i, 2008).

Tabel 1.3
APBD provinsi jambi selama periode 2009 – 2023


Tahun	Pendapatan (Triliun Rupiah)	Belanja (Triliun Rupiah)
2009	1.353,900,000,000	1.530,073,000,000
2010	1.395,186,000,000	1.596,391,000,000
2011	1.399,121,000,000	1.498,751,000,000
2012	1.734,302,000,000	1.942,503,000,000
2013	1.102,090,000,000	1.114,840,000,000
2014	1.220,460,000,000	1.264,600,000,000
2015	1.361,940,000,000	1.445,470,000,000
2016	1.532,050,000,000	1.615,870,000,000
2017	1.460,790,000,000	1.572,660,000,000
2018	1.627,980,000,000	1.671.630,000,000
2019	1.660,050,000,000	1.710,610,000,000
2020	1.745,510,000,000	2.212,680,000,000
2021	1.655,330,000,000	2.073,290,000,000
2022	1.690,840,000,000	1.773,750,000,000
2023	1.692,550,000,000	1.744,550,000,000

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk)

Dari data APBD mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pendapatan dan belanja daerah menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan kenaikan yang signifikan pada tahun-tahun tertentu. dalam periode tersebut. Peningkatan jumlah total APBD tersebut 2,7 kali lipat. Peningkatan rata-rata APBD per tahun sebesar 13,4%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi, sehingga meningkatkan penerimaan APBD. Pemerintah meningkatkan belanja pemerintah untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pemerintah pusat juga meningkatkan transfer ke daerah untuk mendorong pembangunan daerah. Hal ini mungkin berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 membutuhkan alokasi anggaran yang

besar untuk penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan belanja daerah Provinsi Jambi pada tahun 2020 dan 2021. Pemerintah daerah terus melaksanakan dan berupaya dalam penanganan dan pemulihan ekonomi provinsi jambi. Sektor perekonomian mulai membaik dan pemerintah dapat menjalankan program daerah. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Adi, 2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Tabel 1.4
Inflasi di Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2023



Tahun	Tingkat Inflasi (%)
2009	2.50
2010	10.52
2011	2.76
2012	4.22
2013	8.74
2014	8.72
2015	1.37
2016	4.54
2017	2.68
2018	3.02
2019	1.27
2020	3.09
2021	1.67
2022	6.39
2023	3.27
Rata-rata	4.32

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2024

Pada tabel di atas menjelaskan rata-rata inflasi di provinsi jambi yaitu 4.32 persen. Inflasi terendah pada 2019 yaitu 1.27 persen dengan terkendalinya harga pangan. Tingkat inflasi tertinggi adalah 10.52 persen pada tahun 2010. Tingkat inflasi yang tinggi merupakan fenomena yang di takuti oleh semua Negara. Inflasi itu sendiri yaitu kecenderungan dari harga harga untuk naik

secara umum dan terus-menerus. Menurut (Nopirin,2000:104) mengungkapkan bahwa Inflasi ialah suatu proses dari suatu kenaikan harga pada umumnya dan bergerak secara terus-menerus, misalnya pada barang-barang primer kebutuhan sehari-hari.

Produk Domestik bruto merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang secara umum digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah baik di tingkat wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota digunakan Produk Domestil Bruto(PDRB), sehingga perubahan pada PDRB memiliki pengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. Produk Domestik Regional Bruto terbagi atas dua yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan dua indikator ini akan di peroleh gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat disuatu wilayah.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan penelitian penulis ajukan ini dapat identifikasikan masalah yang di lihat dari latar belakang dapat disimpulkan identifikasi masalah meliputi :

1. Kredit perbankan di provinsi jambi tahun 2009 – 2023 yang mengalami kenaikan yang meningkat di tiap tahunnya.
2. APBD di provinsi jambi tahun 2009 – 2023 yang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun Pendapatan dan belanja daerah menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan kenaikan.

3. Tingkat inflasi di Provinsi Jambi tahun 2009 – 2023 yang masih tinggi dari tahun ke tahun yang menurunkan kesejahteraan masyarakat yang mengarah pada kenaikan harga barang dan jasa.
4. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2009 – 2023 yang tidak konsisten dan fluktuatif cenderung lambat dari tahun ke tahun yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kredit perbankan, APBD dan inflasi secara simultan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2009 – 2023?
2. Bagaimana pengaruh kredit perbankan, APBD dan inflasi secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2009 – 2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit perbankan, APBD dan inflasi secara simultan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2009 – 2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kredit perbankan, APBD dan inflasi secara parsial terhadap Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2009 – 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, terutama dalam pemanfaatan repository sebagai media untuk memperlancar penyelesaian penulisan skripsi.

